YANCE Z. RUMAHURU

Dua Kota Satu Cerita

Dinamika Kerukunan dan Pemanfaatan Modal Sosial di Ruang Konflik

Kata Pengantar
ROBERT HEFNER

Dua Kota Satu Cerita
YANCE Z. RUMAHURU

Dua Kota Satu Cerita

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

YANCE Z. RUMAHURU

Dua Kota Satu Cerita

Dinamika Kerukunan dan Pemanfaatan Modal Sosial di Ruang Konflik

Pengantar

Robert (Bob) Hefner

(Pardee School of Global Affairs, Boston University)

PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2019

DUA KOTA SATU CERITA:

DINAMIKA KERUKUNAN DAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DI RUANG KONFLIK

Copyright ©Yance Z. Rumahuru, 2019

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2019
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp.: 085105019945; Fax.: 0274-620606
Email: redaksiombak@yahoo.co.id
Facebook: Penerbit OmbakTiga
www.penerbitombak.com

PO 840. 09. '19

Penulis: Yance Z. Rumahuru
Editor: Marlin Ch. Laimaheriwa dan Vincent K. Wenno
Tata letak: Tim Ombak
Desain sampul: Padjitem (Jimy Pattiasina)

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

DUA KOTA SATU CERITA:

DINAMIKA KERUKUNAN DAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DI RUANG KONFLIK

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019
xx + 101 hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-258-540-4

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR ~ vii
PENGANTAR AHLI ~ ix
PENGANTAR PENULIS ~ xvi
BAGIAN PERTAMA
MEMBANGUN KERUKUNAN BERBASIS MODAL SOSIAL ~ 1
Pengantar ~ 1
Mengapa Kerukunan Berbasis Modal Sosial Diperlukan ~ 2
Maluku sebagai Field Studies Kerukunan Berbasis Modal Sosial ~ 9
Konstruksi Sosial dan Modal Sosial: *A Theoretical Framework* ~ 18
Konstruksi Sosial ~ 19
Modal Sosial ~ 22
Kerangka Pikir ~ 24
BAGIAN KEDUA
KONTEKS UMUM KERUKUNAN PASCAKONFLIK DI KOTA AMBON DAN KOTA TUAL ~ 27
Pengantar ~ 27
Ambon dan Tual: Kota Para Migran ~ 28
Kota Ambon ~ 28
Kota Tual ~ 34

Relasi dan Integrasi Pascakonflik di Ambon dan Tual~ 37
Kesimpulan ~ 42

BAGIAN KETIGA
JEJAK-JEJAK PEMBANGUNAN KERUKUNAN PASCA KONFLIK ~ 43
Pengantar ~ 43
Inisiatif Membangun dan Memelihara Kerukunan~ 44
Inisiatif Komunitas Kepentingan Ekonomi di Pasar ~ 48
Inisiatif Kelompok Minat atau Hobi dan Pertemanan ~ 54
Kesimpulan ~ 56

BAGIAN KEEMPAT
KESADARAN KRITIS DAN RUANG PUBLIK KERUKUNAN ~ 58
Pengantar ~ 58
Dua Faktor Penyangga Kerukunan Pascakonflik ~ 59
Komunitas Berbasis Identitas Agama dan Etnik ~ 77
Aktivitas Bina Damai Anak Muda Kota
yang Hampir Dilupakan ~ 80
Kesimpulan ~ 83

BAGIAN KELIMA
REFLEKSI TENTANG PRAKSIS MEMBANGUN KERUKUNAN DI AMBON DAN TUAL ~ 85
Mendengar Suara Batin Lokal ~ 85
Terbentuknya Modal Sosial Baru dalam Relasi Antarwarga Pascakonflik ~ 87

DAFTAR PUSTAKA ~ 91
INDEKS ~ 95
TENTANG PENULIS ~ 100

PENGANTAR EDITOR

Menenun informasi dan data menjadi sumber pengetahuan adalah bagian penting dari suatu proses penelitian. Pengetahuan itu pada akhirnya berguna bagi perkembangan keilmuan, sekaligus dasar pembangunan masyarakat. Menemukan informasi dan data yang akurat pada kenyataannya tidak semudah dibayangkan. Peneliti harus bergelut dengan dinamika lapangan, seperti mencari informan, sumber pustaka, dan menyusun hasil penelitian.

Buku ini merupakan hasil dari pengolahan data oleh penulis sebagai peneliti yang telah lama bergelut dengan wacana agama dan perdamaian di ruang akademis maupun praksis. Disadari penuh bahwa sejumlah karya telah membahas konflik, agama dan perdamaian. Oleh karena itu, buku ini memberikan informasi baru yang dikemas dalam bentuk kebaruan perspektif.

Buku ini membahas bentuk dan faktor yang memengaruhi proses perdamaian di Maluku. Uniknya, penelusuran penulis sekaligus peneliti tidak terpaku pada gaya populer, melainkan secara sistematis mengungkapkan dan menjelaskan dimensi-dimensi yang belum terpikirkan oleh penulis maupun peneliti lainnya. Penulis dengan logis menarasikan ide dengan suatu kesinambungan logis,

sehingga pembaca akan merasa dikenyangkan dengan informasi, menikmati konteks, dan digerakkan oleh naluri untuk meluaskan horizon. Demikianlah buku yang baik selalu merangsang pembacanya untuk menyangsikan kenyataan.

Ambon, November 2018

Editor

KATA PENGANTAR AHLI
Sebuah Cerita Penting dari Maluku tentang Kerukunan dan Perdamaian

Robert (Bob) Hefner
(Pardee School of Global Affairs, Boston University)

Di negeri saya, Amerika Serikat, saya sering diajak memberikan komentar tentang kebudayaan dan politik di Indonesia kini. Tentu saja jawaban saya cenderung beragam, sesuai dengan konteks dan pendengar di mana saya berbicara. Namun, salah satu tema yang sering saya utamakan adalah bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang ketiga besarnya di dunia kini, dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim yang terbesar di dunia. Saya sering melanjutkan penjelasan sederhana ini dengan pernyataan bahwa salah satu keistimewaan dari Indonesia ini, yaitu kelompok minoritas yang non-Muslim, seperti orang Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, diakui secara formal sebagai warga negara yang setara dengan warga Muslim. Bahkan, kata saya, kesetaraan ini telah diresmikan dan dibentengi oleh sebuah ideologi nasional yang namanya Pancasila. Hikmah

ini, saya tegaskan, adalah sebuah produk dari kearifan nasional dan lokal dan bukan hanya semboyan kosong saja. Hal itu menjadi salah satu alasan, saya simpulkan, Indonesia sesungguhnya adalah sebuah "great nation."

Komentar sederhana ini sering kali menimbulkan tanggapan skeptis dari para interlokutor saya di Amerika dan negara-negara Barat lain. Walaupun sebagian besar belum banyak tahu tentang sejarah politik Indonesia, seringkali masih ada orang yang pernah dengar cerita tentang konflik horizontal yang meletus di beberapa wilayah di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser Mei 1998. Kadang-kadang juga ada orang yang pernah dengar kabar internasional tentang konflik di wilayah seperti Maluku, yang menyangkut pihak Kristen dan Muslim. Di antara interlokutor itu, jarang sekali ada yang tahu bahwa konflik "agama" itu terbatas kepada wilayah yang menyangkut kurang lebih 7.5% dari seluruh penduduk Indonesia; dan boleh dikatakan saya belum pernah dengar satu orang yang menyakini bahwa salah satu alasan Indonesia mampu mengatasi konflik bersifat agama itu adalah prakarsa atau inisiatif dari masyarakat Indonesia sendiri. Maksud saya bukanlah untuk memperkecil peranan pemerintah Indonesia, polisi RI, atau TNI dalam upaya meredam konflik itu. Peranan institusi formal itu dalam proses perdamaian di Maluku, Poso, ataupun Kalimantan Tengah sebetulnya sangat penting. Namun, baik di luar Indonesia maupun di dalam negeri, orang terkadang cenderung lupa bahwa salah satu alasan konflik di wilayah itu dapat diatasi adalah bahwa

ada prakarsa dari masyarakat lokal sendiri untuk menangani dan mengatasi konflik horizontal itu. Peranan negara, polisi, dan TNI penting, namun peranan masyarakat penting juga.

Inilah sebabnya saya dengan senang hati membaca buku ini dari Dr. Yance Z. Rumahuru. Bapak Yance adalah orang yang saya sempat ketemu beberapa tahun yang lalu, ihwal kunjungan saya ke Ambon, kunjungan yang merupakan bagian dari kerja sama di antara universitas saya (Boston University), Center for Religious and Cross-Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada (perguruan tinggi yang telah dihadiri Pak Yance), dan peneliti terkemuka di Ambon, khususnya Bapak Yance. Pertama kali saya sempat ketemu sama beliau, saya dapat kesan bahwa Bapak Yance adalah orang yang membawa pengalaman yang sangat cerdas sekaligus personil terhadap studi konflik dan perdamaian di wilayah Ambon dan Maluku itu. Beliau tahu tentang konflik tragis Ambon ini dari pengalaman beliau dan keluarga beliau sendiri. Namun, kepahaman Bapak Yance terhadap sejarah Ambon dan Maluku kini tidak terbatas ke pengalaman beliau sendiri. Beliau telah terjun juga ke dalam studi konflik dan perdamaian (*conflict and peace studies*), dan di situ beliau telah menemukan alat-alat intelektual yang sempat memperkaya dan memperdalam pengalaman dan sejarah yang dimiliki sendiri, agar supaya pengalaman itu dijadikan sebuah objek penelitian dan wawasan sosial.

Ada banyak wawasan di dalam buku itu yang mencerminkan hasil pelajaran dan penelitian Bapak Yance ini. Namun, di antaranya yang paling menonjol adalah

observasi beliau bahwa salah satu kunci untuk mengatasi konflik "agama" di Maluku adalah sumbangan yang diberikan oleh kearifan kultural dan jejaring sosial yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat di Kota Ambon dan Kota Tual. Kedua sumber daya manusia itu merupakan sebuah "modal sosial" yang sangat berperan dalam upaya di dua kota itu untuk menciptakan kembali sebuah kerukunan sosial setelah konflik horizontal tahun 1999-2002 dan beberapa periode setelahnya. Dari karangan sosiolog terkemuka Peter L. Berger (kolega akrab saya di Boston University selama 25 tahun), Bapak Yance menunjukkan bahwa modal sosial adalah sebuah konstruksi sosial yang harus dikonstruksikan secara berkelanjutan dan dialektikal, melewati eksternalisi atau pencurahan kedirian manusia ke dalam dunia nyata, baik dalam kegiatan fisik maupun intelektual. Kemudian, objektivasi itu dijadikan suatu realitas yang berhadapan dengan para penciptanya semula, sekarang dalam bentuk suatu kenyataan konkret dan eksternal namun sekaligus sebuah realitas yang harus dijadikan realitas internal yang bermakna lagi. Bagian kedua dari gagasan modal sosial itu dipinjam dan diterapkan Pak Yance dari James Coleman, Robert Putnam, dan Francis Fukuyama. Gagasan modal sosial ini mengacu pada ciri organisasi sosial yang dibutuhkan agar supaya sebuah masyarakat dapat berinteraksi secara positif dan efisien tanpa gangguan ataupun konflik. Di antara ciri ini yang paling pokok adalah kepercayaan (*trust*), nilai-nilai atau norma-norma "pro-sosial," dan jejaring sosial (*networks*) yang mampu meningkatkan efisiensi dan keyakinan sosial di sebuah masyarakat, sehingga masyarakat

itu dapat kerja sama untuk menghadapi tantangan apa pun secara terkoordinasi.

Di bidang kajian modal sosial, dua isu yang dijadikan fokus utama adalah, yang *pertama*, bagaimana caranya untuk menciptakan sumber daya sosial yang sedemikian penting untuk sebuah masyarakat yang efisien sekaligus rukun? Dan yang *kedua*, peranan pemerintah dan institusi formil di dalam proses pembentukan modal sosial itu seperti apa saja? Di sini juga, yaitu tentang kedua pertanyaan ini, studi Bapak Yance ini memberikan sebuah sumbangan besar terhadap penelitian modal sosial di Maluku khususnya dan Indonesia pada umumnya. Beliau memperlihatkan bahwa peranan pemerintah, polisi, dan TNI sangat berperan dan sangat positif. Namun, karena di mana saja, di dunia ini kerukunan sosial juga sangat bergantung pada modal sosial yang dikembangkan di masyarakat lokal, beliau juga sempat memperlihatkan bahwa sebagian dari modal sosial untuk pelestarian kerukunan berasal dari interaksi sosial "orang biasa." Yaitu, modal sosial itu berasal dari orang yang dalam kehidupan sehari-hari sempat melintasi-batas agama, dan akibat itu dampaknya adalah sedikit demi sedikit menciptakan sebuah modal sosial untuk kerukunan lintas agama.

Patut dilihat juga bahwa sebagian besar dari modal sosial yang sempat menciptakan kerukunan sosial di tengah masa konflik berasal dari lingkungan dan interaksi sosial yang jauh di luar dugaan pengamat politik: yaitu, ia diciptakan di sekolah dan di kantor, misalnya, di mana

orang dari semua agama berinteraksi terus di tengah konflik, dan dari situ mempertahankan sebuah kerukunan sosial yang riil dan penting; ataupun ia diciptakan di pasar, wahana yang mampu menipiskan rasa saling curiga yang berlebihan dan mengembalikan ikatan relasi persaudaraaan. Tentu saja kearifan lokal juga memiliki peran, seperti (di Ambon) *gandong* dan *pela* turut berperan. Baik di Kota Ambon mapunpun di Tual pascakonflik ada jejaring sosial yang sedikit demi sedikit dapat mengembalikan hubungan yang menjaga dan memberi jaminan untuk melintasi batas-batas masing-masing tanpa gangguan. Kesimpulan akhir dari studi ini mencerminkan hasil dari konvergensi sosial ini: "Sampai dengan tahun 2017, saat penulis sedang melakukan penelitian..., dapat disebut bahwa relasi masyarakat pascakonflik pada kedua kota menunjukkan sebuah perkembangan sangat menggembirakan." Menarik juga adalah kesimpulan lanjut, bahwa "kegiatan komunitas-komunitas yang dilakukan secara independen, lepas dari campur tangan pemerintah dan dilakukan atas inisiatif sendiri."

Tentu saja, pernyataan yang terakhir ini tidak sama sekali memperkecil atau meniadakan peranan ataupun kepentingan institusi formal termasuk negara dalam proses perdamaian di Maluku. Namun, studi ini mengingatkan kita bahwa satu di antara kunci untuk mencapai kerukunan sosial adalah modal dan kepercayaan sosial lintas kelompok dan lintas agama, modal yang sebagian besar berasal dari interaksi masyarakat sendiri. Namun, sumber daya sosial

yang dibangun dan diperluas melewati proses internalisasi dan eksternalisasi pada satu saat harus diajak juga ke dalam sebuah "kolaborasi lintas batas negara-masyarakat" (*collaboration across the state-society divide*), kalau boleh saya pinjam frase dari ahli politik dan modal sosial, Peter Evans. Kolaborasi itu patut dilakukan agar sumber daya sosial yang terletak di masyarakat dapat dilindungi bahkan diperluas dan diberdayakan melewati sebuah sinergi positif yang berkelanjutan.

Menurut saya, kesimpulan Bapak Yance ini patut dipelajari tidak hanya di Maluku, namun di seluruh Indonesia. Bahkan kesimpulan ini sangat patut dipelajari di negara lain, misalnya di Amerika Serikat. Di negara Paman Sam, belakangan ini, terutama di bawah pimpinan Presiden Donald Trump, ada sebuah kecenderungan yang menyedihkan. Kecenderungan ini mengabaikan kepentingan kepercayaan sosial (*social trust*), kesetaraan warga, dan modal sosial lain yang notabene sangat dibutuhkan agar supaya demokrasi dapat dijalankan atas dasar yang harmonis dan rukun. Singkat kata, studi Bapak Yance ini merupakan sebuah sumbangan intelektual yang patut diteliti tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain, terutama pada periode waktu figur internasional tertentu tergoda mengabaikan jenis kearifan lokal yang dilestarikan di Maluku dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Robert (Bob) Hefner

Boston, Massachusetts, USA 16 Juni 2019

PENGANTAR PENULIS

Buku ini memotret konteks mikro proses membangun harmoni sosial dan perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat majemuk di Maluku pascakonflik, yang dapat dihubungkan dengan konteks makro Indonesia maupun negara-negara lain dalam menghadapi fenomena sama. Data yang digunakan menulis buku ini utamanya adalah hasil penelitian penulis tahun 2017 di Kota Ambon dan Kota Tual, di samping rujukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Pembahasan buku ini terdiri atas lima bagian. Bagian *pertama* mendeskripsikan alasan kerukunan berbasis modal sosial dikaji, dengan menampilkan Maluku sebagai *field studies*; diikuti dengan konsep teoritik yang dijadikan acuan pembahasan ini. Bagian *kedua* menjelaskan konteks kerukunan pascakonflik di Kota Ambon dan Kota Tual, dua kota di Kawasan Timur Indonesia yang menjadi pusat konflik sosial akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, untuk menunjukkan seperti apa realitas kedua wilayah yang dijadikan lokus kajian ini. Bagian *ketiga* mengurai temuan penelitian terkait bentuk-bentuk aktivitas kelompok-kelompok masyarakat di Ambon dan Tual, yang sepintas tampak biasa tetapi turut memengaruhi terbangun dan terpeliharanya harmoni sosial dan perdamaian dalam

masyarakat pascakonflik yang sedang distudikan. Bagian *keempat* merupakan kelanjutan pembahasan temuan penelitian terkait faktor yang memengaruhi terbangunnya harmoni sosial dan pemeliharaan perdamaian pascakonflik di Kota Ambon dan Kota Tual. Bagian *kelima* merupakan penutup, yang disajikan dalam bentuk refleksi terhadap upaya kelompok-kelompok masyarakat di Kota Ambon dan Kota Tual menggunakan modal sosial dan modal budaya yang dimiliki, dan atau menciptakan modal sosial baru sebagai kekuatan membangun dan menjamin keberlanjutan harmoni sosial dan perdamaian pascakonflik.

Proses perampungan buku kecil ini mendapat bantuan dari banyak kalangan. Pendanaan penelitian dan penerbitan buku ini diperoleh dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon, yang saat ini telah bertransformasi menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyatakan terima kasih kepada, Rektor IAKN Ambon Dr. Agusthina Ch Kakiay, M.Si, atas nama institusi telah menyediakan bantuan dana penelitian dan penerbitan buku bagi para dosen, sekaligus menjadi pribadi yang terus mendorong setiap orang untuk berkarya dan maju bersama, termasuk dukungannya kepada penulis. Beberapa pihak yang ingin penulis sebut dan menyatakan terima kasih adalah para informan di Kota Ambon dan Kota Tual yang telah menyediakan waktu berbagi cerita dan bersedia diwawancarai, tiga orang mitra penulis yang dengan rela dan sukacita membantu penulis dalam hal pengambilan

data saat penelitian di Kota Ambon dan Kota Tual, masing-masing: Marlin Laimeheriwa dan Vincent Wenno di Ambon dan Jufri Derwotubun di Tual. Marlin dan Vincent sekaligus menjadi editor untuk buku ini. Saya juga patut berterima kasih kepada Regina Wermasubun (istri terkasih); Tuale Yutnes Eldios dan Soile Dwi Bei (anak-anak kami) yang terus menjadi penyemangat, walau kadang untuk mengejar penyelesaian pekerjaan dan menghasilkan satu karya kecil, mereka harus menerima keegoisan saya "mencuekan" mereka dan mengorupsi waktu bersama mereka. Waktu efektif perjumpaan kami adalah pada pagi hari saat semua bergegas beraktivitas, dan pada sore atau malam saat makan dan sebelum tidur.

Buku kecil ini adalah bagian dari kegelisahan akademik saya mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja untuk membangun dan menjaga harmoni dan damai dalam kemajemukan masyarakat dengan pendekatan dari bawah, kejeniusan lokal dan kreativitas milik mereka sendiri. Penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Profesor Robert Hafner dari Boston University yang telah bersedia menulis pengantar buku ini. Pak Bob, sapaan akrab Robert Hefner adalah satu dari generasi tua Indonesianis di Amerika yang sangat mencintai Indonesia dan terus mempromosi Indonesia di Amerika dan dunia, dan akhir-akhir ini sedang melakukan riset di berbagai belahan dunia untuk mengembangkan teori *Scaling up Pluralism*. Terima kasih yang sama diberi kepada penerbit yang telah membantu penerbitan buku ini tepat waktu. Akhir kata,

dalam berbagai keterbatasannya buku ini dipersembahkan untuk pembaca, dan terutama kepada mereka yang sedang bekerja untuk pemeliharaan harmoni dan perdamaian.

Poka-Ambon, 27 Oktober 2018

BAGIAN I
MEMBANGUN KERUKUNAN BERBASIS MODAL SOSIAL

Pengantar

Damai dalam konflik selalu diperjuangkan dan bukan suatu hal yang tidak mungkin. Dalam dua dekade terakhir Indonesia menjadi lahan subur konflik dan kekerasan antarkelompok, dan identitas agama dan etnik dikonstruksi menjadi faktor dominan penyebab berbagai konflik dimaksud (Mas'oed, dkk., 2000; Triyono, 2004; Pieris, 2004; Bertrand, 2004; Rumahuru, 2005; van Klinken, 2005 dan 2007; Mujiburrahman, 2006; Barron, Azca, dan Susdinarjanti, 2012). Walau demikian umat beragama dengan beragam budayanya pula yang turut berkontribusi menghentikan konflik, membangun harmoni dan perdamaian, walau seringkali diabaikan dalam narasi studi-studi perdamaian dan kerukunan. Bahkan, pandangan agama telah menyatu dengan pandangan adat atau budaya membentuk suatu kejeniusan atau kearifan yang dijumpai dalam masyarakat untuk membangun harmoni dan perdamaian (Mujib dan Rumahuru, 2010; Brauchler, 2015). Dalam konteks masyarakat konflik

seperti yang terjadi di Maluku tahun 1999 dan berlanjut hingga 2011 lalu, teramati bahwa dalam masyarakat yang berkonflik, selalu terdapat upaya-upaya dan inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk membangun relasi antarkelompok masyarakat berkonflik, menegosiasikan penghentian konflik dan membangun harmoni melalui pemanfaatan jaringan dan institusi-institusi sosial yang dimilikinya, yang dalam buku ini disebut sebagai kerukunan berbasis modal sosial. (Rumahuru, 2005; Pariela, 2008; Pattinama, 2009; Rahawarin, 2010; Soumokil, 2011; Ubra, 2015). Fenomena inisiatif masyarakat memanfaatkan kearifan lokal maupun menciptakan modal sosial baru merupakan hal menarik bagi penulis, dan hal tersebut yang akan dipotret dalam buku ini. Pada bagian pertama buku ini, akan disajikan konteks dan alasan-alasan mengapa penting kerukunan berbasis modal sosial. Deskripsi tentang konteks di sini merujuk pada kondisi faktual di Indonesia dan secara khusus Maluku (Kota Ambon dan Kota Tual), salah satu pusat konflik di Kawasan Timur Indonesia, namun saat ini berhasil membangun kerukunan dan perdamaian.

Mengapa Kerukunan Berbasis Modal Sosial Diperlukan?

Fanatisme sempit, eksklusivitas, dan *prejudice* dari kelompok-kelompok umat beragama dan etnik di Indonesia telah menjadi lahan subur penyemaian intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Fenomena ini membuat

gaduh masyarakat majemuk seperti di Indonesia dan berpotensi membuat konflik antarkelompok-kelompok warga beda agama dan etnik. Dalam dekade terakhir kemunculan berbagai praktik intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme di sejumlah wilayah di Indonesia semakin marak. Hal ini jika tidak disikapi dengan arif, maka masyarakat dapat terprovokasi dengan paham radikal dan ekstremis, serta tindakan anarkis yang tentunya berdampak negatif pada kerukunan umat beragama, maupun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sedang membangun diri menjadi negara dengan bonus demografi serta memiliki keragaman etnik dan agama sebagai faktor penting membangun NKRI saat ini dan ke depan. Untuk mengantisipasi menguatnya radikalisme dan ekstremisme di kalangan masyarakat Indonesia, maka diperlukan model-model penanganan konflik termutakhir untuk membangun relasi dan kerukunan pada wilayah-wilayah yang pernah berkonflik. Fenomena ini yang akan dilihat dalam buku ini, khususnya potret kehidupan kelompok-kelompok masyarakat beda agama di Maluku, wilayah Ambon dan Tual, yang pernah berkonflik dan mengalami perubahan sikap beragama dalam 15 tahun terakhir.

Fenomena relasi antarkelompok-kelompok umat beragama secara makro menunjukkan bahwa di satu sisi kerukunan hidup beragama menjadi dambaan semua kelompok umat beragama, tetapi di sisi lain sering terjadi pula kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan di kalangan kelompok umat beragama, yang jika tidak dikelola akan

berpotensi menimbulkan konflik. Dalam sejarah agama-agama, secara khusus agama Kristen, Yahudi, dan Islam atau yang dikenal dengan sebutan *Abrahamic Religions*,[1] sekalipun sama-sama mengajarkan tentang rukun dan memiliki kesamaan-kesamaan, tetapi tidak jarang juga menunjukkan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pertentangan dan konflik di antara ketiga agama yang lazim disebut sebagai kakak-adik ini. Azumardi Azra menggunakan istilah *sibling rivalry* untuk menunjuk pada fenomena ini (Azra, 2003: 8). Menurut penulis, *sibling rivalry* di kalangan para penganut agama dalam konteks Indonesia hari ini, ditunjukkan dengan kontestasi antara kelompok-kelompok yang menginginkan adanya kerukunan atau harmoni dan kelompok-kelompok yang memaksakan ideologi berbeda yang berpotensi mengancam kerukunan atau disharmoni.

Dalam konteks Indonesia, kerukunan menjadi salah satu topik percakapan intens, mulai dari kalangan agamawan, akademisi, birokrat, politisi, hingga rakyat biasa. Apalagi dalam satu dasawarsa terakhir, marak terjadi praktik intoleransi agama yang bermuara pada praktik radikalisme, ekstremisme serta konflik dan kekerasan atas nama agama. Dalam amatan penulis, terdapat prapaham bahwa sudah tidak ada permasalahan terkait hal tersebut

---

[1] Agama Yahudi, Kristen dan Islam disebut *Abrahamic Religion* karena memiliki leluhur sama yaitu Abraham yang dikonstruksi dalam sejarah Yahudi sebagai leluhur orang Israel atau yang dalam tradisi Islam dikenal dengan Nabi Ibrahim. Ketiga agama besar dunia ini dalam sejarah perjalanannya saling mencurigai bahkan bersaing sehingga tidak jarang menimbulkan konflik terbuka atau perang satu dengan lainnya.

dalam kehidupan masyarakat, karena kerukunan sudah sering diperbincangkan dan bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga permasalahan kerukunan seakan sudah tuntas secara konseptual maupun praksis. Kontras dengan anggapan tersebut, menurut hemat penulis, kerukunan merupakan hal yang sesungguhnya masih perlu terus dipercakapkan dalam rangka membangun pemahaman maupun sikap bersama untuk mewujudkan harmoni sosial dalam kehidupan nyata masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan kajian pada level makro maupun mikro untuk memotret baik pemahaman, maupun praktik kerukunan di kalangan masyarakat yang dapat menyumbang pada pengambilan kebijakan terkait upaya membangun kerukunan substansial dan mengelola keragaman dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Kerukunan sebagaimana dimaksud dapat dipahami sebagai kondisi keseimbangan sosial dalam masyarakat karena adanya ketenangan, keharmonisan, dan saling percaya antarindividu maupun kelompok. Istilah kerukunan sudah menjadi kosakata yang akrab dan populer bagi masyarakat Indonesia. Kerukunan berasal dari kata dasar *rukun*, yang menunjuk pada suatu kondisi keseimbangan sosial (*social equilibrium*), di mana semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dan dalam suasana tenang dan sepakat (Suseno, 1993: 39). Rukun merupakan keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, mulai dari keluarga sebagai unit terkecil hingga negara dan bangsa

sebagai unit tertinggi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kerukunan sudah menjadi bagian hidup yang terkandung di dalamnya aturan atau tepatnya semacam etika sosial untuk mengatur kehidupan bersama warga masyarakat. Di setiap daerah terdapat istilah yang menunjuk pada hal rukun atau kerukunan sebagaimana dimaksud. Di Maluku misalnya, ungkapan *orang basudara* bermakna lebih dari kerukunan, karena ungkapan ini selain menekankan harmoni dan tenggang rasa serta nilai-nilai etis, juga tanggung jawab untuk saling menjaga dan mendukung untuk maju bersama (Rumahuru 2016: 2).

Kajian tentang kerukunan di Kota Ambon dan Kota Tual oleh penulis dipandang penting saat ini untuk dikaji karena Kota Ambon dan Kota Tual di Provinsi Maluku sesuai survei tentang indeks kerukunan di Indonesia tahun 2016, termasuk dalam katagori 10 kota dengan indeks kerukunan terbaik di Indonesia (Kementerian Agama 2016). Diketahui bahwa Kota Ambon dan Kota Tual di Provinsi Maluku merupakan dua wilayah dengan karakteristik masing-masing, tetapi dalam sejarahnya sama-sama menjadi kota migrasi berbagai kelompok masyarakat pulau-pulau, bahkan suku bangsa dengan latar belakang budaya dan agama berbeda membangun hidup di sini. Masyarakat kedua wilayah ini pernah mengalami guncangan badai pertikaian hebat yang dikenal dengan konflik Maluku pada 1999-2002, namun saat ini masyarakat sudah dapat membangun diri lagi keluar dari keterpurukan akibat konflik yang dialami hampir 20 tahun silam. Pembangunan masyarakat

Kota Ambon dan Kota Tual pascakonflik yang "rukun dan damai" menarik perhatian penulis, karena terlepas dari upaya pemerintah atau negara melalui aparaturnya, diketahui bahwa kelompok-kelompok masyarakat memiliki mekanisme tersendiri dalam hal membangun diri keluar dari keterpurukan akibat konflik tersebut (Laksono dan Topatimasang, (ed.), 2004, Rumahuru 2005, Rahawarin 2010, Mujib dan Rumahuru, 2010; Ubra 2016).

Lepas dari persoalan variabel yang digunakan dalam hal menetapkan indeks kerukunan setiap daerah di Indonesia, terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang tidak mengalami konflik separah di Kota Ambon dan Tual, seperti di Kupang, Jawa Timur, dan Kalimantan, namun perkembangan kerukunan antarumat beragama pada wilayah-wilayah tersebut tidak mengalami kemajuan seperti di Kota Ambon dan Kota Tual. Oleh karena itu, penting mengkaji cara masyarakat membangun kerukunan di Kota Ambon dan Kota Tual, sehingga menunjukkan kondisi baik saat ini. Kajian seperti ini penting untuk memotret bentuk-bentuk kegiatan masyarakat yang menyumbang untuk kerukunan antarumat beragama dan faktor-faktor yang memengaruhi terbangunnya kerukunan, dan sudah tentu menyumbang bagi pengelolaan keragaman dan pembangunan perdamaian.

Buku ini memberi perhatian pada fenomena kerukunan yang dikonstruksi oleh kelompok-kelompok masyarakat di Kota Ambon dan Kota Tual, serta faktor–faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu akan dibahas (1) bentuk-bentuk kerukunan yang dikonstruksi oleh kelompok-

kelompok masyarakat di Kota Ambon dan di Kota Tual Provinsi Maluku, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi terbangunnya kerukunun di kalangan masyarakat Kota Ambon dan Kota Tual yang majemuk dan baru saja mengalami konflik yang melibatkan agama pada kedua wilayah tersebut. Konstruksi kerukunan yang dipotret buku ini mengedepankan narasi-narasi biasa dan "kecil", dari kelompok-kelompok masyarakat kedua kota yang karena dianggap biasa, hampir atau bahkan tidak diperhitungkan sebagai bentuk dan faktor yang berpengaruh signifikan untuk proses membangun harmoni sosial dan perdamaian sejati.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kerukunan bukan persoalan baru dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat dan pemeluk agama-agama. Persoalan ini melintasi ruang dan waktu, dan menarik untuk terus dibicarakan, karena tidak jarang terjadi persaingan secara negatif di kalangan pemeluk agama yang menimbulkan konflik antarpemeluk agama berbeda. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, secara khusus di Kota Ambon dan Kota Tual yang memiliki pengalaman konflik antaragama, kajian tentang kerukunan merupakan hal penting untuk melihat seperti apa kelompok-kelompok masyarakat mengelola diri sendiri membangun relasi harmoni dalam keragaman yang dimilikinya. Pengabaian terhadap kajian-kajin level mikro seperti ini berakibat pada generalisasi pendekatan dan kebijakan pembangunan masyarakat pascakonflik dan persoalan pengelolaan keragaman yang

tidak tuntas dan salah sasaran. Setiap kelompok masyarakat tentu memerlukan pendekatan penanganan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kultur, karakteristik pada wilayah masyarakatnya atau konteks kultural, keagamaan, dan sosiologis dari setiap wilayah yang akan dijadikan subjek pembangunan. Penulisan ini dengan sendirinya memberi penguatan terhadap eksistensi dan potensi kelompok-kelompok masyarakat pascakonflik di Kota Ambon dan Kota Tual untuk menata dan membangun diri agar tidak tertinggal dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Maluku sebagai *Field Studies* Kerukunan Berbasis Modal Sosial

Provinsi Maluku memiliki pengalaman dilanda konflik antarwarga beda agama, walau bukan agama sebagai faktor utama penentu konflik, tetapi karena isu agama dipolitisir menjadi dominan, maka kebanyakan orang menyebutnya konflik agama (lihat van Klinken, 2001; 2007) sebagai masyarakat yang mengalami konflik. Kenyataannya terdapat trauma dan dendam terutama bagi mereka yang mengalaminya, tetapi seiring berjalannya waktu dan berbagai inisiatif membangun diri dari keterpurukan yang pernah dialami, saya melihat bahwa konflik memberi pembelajaran besar bagi masyarakat Maluku untuk membangun kerukunan lebih baik. Untuk mendapat gambaran bagaimana relasi antarwarga dan kerukunan yang dibangun pascakonflik di Maluku (baca: Ambon dan Tual), terdapat sejumlah penelitian dan publikasi yang

dikemukakan untuk melihat dinamika masyarakat pada kedua wilayah yang dijadikan fokus kajian buku ini.

Kajian yang memberi perhatian pada masyarakat pascakonflik di Maluku membangun relasi antarkelompok yang berbeda agama dan etnik dalam rangka membangun harmoni sosial atau kerukuan antara lain dilakukan oleh *pertama*, Adam Latuconsina yang meneliti hubungan antaragama dan etnik di kalangan siswa SMA di Kota Ambon. Penelitian ini telah dipublikasi oleh Kementerian Agama (2013) dengan judul "Relasi Agama dan Etnik dalam Pendidikan." Temuan penelitian Latuconsina dapat disimpulkan sebagai berikut: Konflik sosial di Kota Ambon pada 1999-2002 telah mengonstruksi ruang sosial masyarakat Kota Ambon dalam katagori-katagori agama dan etnik yang juga berdampak pada relasi di ruang publik, misalnya sekolah. Ditemui bahwa telah terjadi perubahan pola hubungan antaragama dan etnik di ruang publik sekolah yang memengaruhi relasi siswa di Kota Ambon. Temuan Latuconsina menarik diperhatikan karena di sekolah yang mayoritas siswanya beragama Islam, tampak relasi antaretnik lebih baik dibandingkan dengan relasi antarsiswa seagama. Pada sekolah mayoritas siswanya beragama Kristen, relasi antarsiswa seagama lebih erat dibandingkan dengan relasi antaretnik, sedangkan pada sekolah perbatasan, para siswa memiliki toleransi yang tinggi dalam melakukan interaksi antara siswa yang berbeda agama maupun etnik.

Perubahan relasi siswa SMA di Kota Ambon memunculkan persepsi sosial tersendiri terhadap agama dan etnik di kalangan siswa, yang tampak pada perubahan perilaku dan interaksi siswa. Sekolah di wilayah Muslim, misalnya, perubahan perilaku siswa bukan karena ikatan keagamaan, tetapi lebih pada fanatisme kedaerahan atau asal-usul kampung. Para siswa cenderung berinteraksi dengan sesama siswa yang memiliki latar budaya dan asal-usul sama, sedangkan siswa pada sekolah di wilayah Kristen perubahan perilakunya lebih didasarkan pada kesamaan lingkungan pemukiman dan kesamaan agama. Siswa pada wilayah mayoritas agama Kristen dan Islam dapat menerima penggunaan simbol-simbol agama di samping simbol institusi pendidikan di lingkungan sekolah, tetapi tidak menerima penggunaan simbol-simbol lain di luar kedua simbol tersebut. Hal ini berbeda dengan siswa pada sekolah perbatasan, mereka cukup toleran terhadap penggunaan baik simbol agama dan simbol institusi pendidikan maupun simbol-simbol lain yang mengikuti tren anak muda di ruang publik sekolah seperti, penggunaan berbagai aksesoris, model rambut, dan gaya berbusana. Perubahan sikap siswa juga dapat dilihat melalui beberapa kegiatan program sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pola pembelajaran dengan penggunaan KTSP yang melibatkan siswa lebih kreatif dan komunikatif dalam belajar, serta suasana lingkungan yang kondusif.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun relasi yang menciptakan pembauran di kalangan siswa beda agama dan etnik pascakonflik sosial di Ambon.

Penyebabnya adalah sekolah menjadi ruang publik yang efektif bagi proses interaksi di antara berbagai komponen pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan juga merupakan media bagi pembentukan karakter dan terciptanya dialog yang lebih intens di kalangan siswa, sehingga terbangun sikap saling menghargai yang mengarah pada penerimaan kelompok-kelompok beda agama dan etnik. Menurut saya, sekolah memiliki peran strategis membangun kerukunan antarkelompok yang beragam, sekaligus media promosi kerukunan yang jika tidak dikelola secara benar dapat berfungsi terbalik mengonstruksi nilai intoleransi.

Kedua, Pariela (2008) mengkaji tentang *Preserved Social Capital* sebagai *Basis Survival Strategy*, dengan fokus Desa Wayame. Pariela menemukan bahwa di tengah amukan konflik yang begitu hebat di Kota Ambon, modal sosial di kalangan warga pada kampung atau desa dan kelurahan di Kota Ambon mengalami tekanan dan masyarakat beda agama berhadap-hadapan dalam konflik. Warga beda agama (Islam dan Kristen) di Desa Wayame dapat hidup aman dan mempertahankan diri dari berbagai pengaruh atau provokasi kelompok lain untuk berkonflik, karena eksistensi modal sosial sebagai *embedded resources* di kalangan warga masyarakat Wayame tetap dipertahankan, diawetkan dengan sengaja (*preserved social capital*), dan dimanfaatkan sebagai basis aksi bersama demi menjaga stabilitas sosial dan keamanan di dalam desanya.

Faktor-faktor yang memengaruhi modal sosial sebagai aset kolektif di Desa Wayame dapat dipelihara dan dapat

dimanfaatkan untuk mempertahankan damai di tengah konflik saat itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, komitmen mereka terhadap stabilitas dan keamanan di dalam desa. *Kedua*, proses indentifikasi diri yang terbentuk secara alamiah, dan kemudian mengalami penguatan oleh Tim 20, sehingga memungkinkan masyarakat Wayame memandang diri sebagai satu komunitas (Islam dan Kristen) dengan batas-batas teritori tertentu, yang tidak dapat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain di luar Wayame yang tersegregasi menurut agama. *Ketiga, preserved social capital*, di mana ketersediaan modal sosial (*stock of social capital*) yang sebelumnya sudah ada seperti rasa saling percaya jejaring dan norma-norma sosial, dipertahankan dan diawetkan sebagai aset kolektif yang setiap saat digunakan untuk menghadapi situasi tekanan konflik.

Temuan Pariela menunjukkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat beda agama sekalipun dalam kondisi konflik yang mengatasnamakan agama sehingga mereka saling berhadap-hadapan satu dengan lainnya, tetapi selalu terdapat modal sosial sebagai aset kolektif yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Ketiga, Ubra (2016) meneliti tentang relasi dan pembangunan perdamaian berbasis multikultural di Desa Wayame Kota Ambon. Ubra menemukan alasan mengapa Wayame selama konflik maupun pascakonflik menjadi wilayah netral bagi semua orang. Masyarakat Desa Wayame merupakan suatu masyarakat yang bersifat terbuka (*open society*) untuk menyatukan dan mengeratkan kembali (*re-*

integrasi) masyarakat sekitar yang multikultural, terutama melalui Pasar Wayame. Pasar menjadi wadah pemersatu untuk saling mempertemukan dan mengeratkan lagi relasi *orang basudara*, dan *salam-Sarane* yang telah terganggu. Dengan kata lain, Desa Wayame menjadi ruang publik bagi proses rekonsiliasi dan pendidikan damai antarmasyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Meskipun situasi di Kota Ambon sementara dilanda konflik, namun masyarakat Kota Ambon secara lintas etnik dan agama, saling berinteraksi melalui transaksi jual-beli di Pasar Wayame yang kini dinamai Pasar Damai. Hal ini dilakukan demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar menjadi wahana yang mampu menipiskan rasa saling curiga yang berlebihan, mengembalikan keretakan relasi persaudaraan dan menumbuh-kembangkan hidup yang saling menghargai dan menghormati perbedaan. Konteks perdamaian yang tercipta di Desa Wayame, bukan hanya dirasakan oleh masyarakat setempat (secara internal), tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat yang lebih luas (secara eksternal).

Keempat, Rahawarin (2010) meneliti tentang kerjasama antar umat beragama dalam penyelesaian konflik di Kota Ambon dan Kota Tual Maluku. Penelitian ini menemukan bahwa: (1) dalam rangka menciptakan hubungan sosial antarumat beragama menggunakan paradigma struktural dan fungsional. Contoh pendekatan struktural adalah perjanjian di Malino 2002 yang melibatkan elite-elite masyarakat berupa tokoh adat dan tokoh agama. Sementara

contoh pendekatan fungsional adalah penciptaan kerjasama yang disemangati oleh kearifan lokal yang dimiliki, dalam hal ini budaya *pela* dan *gandong* untuk masyarakat Kota Ambon, dan budaya *larvul ngabal* untuk masyarakat Kota Tual; (2) pembangunan perdamaian melalui kerjasama antarumat beragama pascakonflik di Kota Tual dianggap lebih berhasil dibanding dengan di Kota Ambon. Hal ini disebabkan oleh pendekatan budaya lokal atau fungsional di Kota Tual tampak lebih kuat daripada di Kota Ambon.

Kelima, Rumahuru (2005 dan 2016) memberi perhatian pada dialog dan inisiatif damai serta relasi antara komunitas adat beda agama dengan mengambil setting tempat di Kota Ambon, Tual dan Maluku Tenggara memberi gambaran tentang eksistensi masyarakat adat pascakonflik pada wilayah-wilayah tersebut sebagai berikut: (1) Rumahuru (2005) yang mengkaji tentang dialog dan inisiatif damai di Kota Ambon, dengan memotret kasus Negeri Batu Merah dan Negeri Passo, dua negeri adat di Kota Ambon yang memiliki hubungan *pela*, menemukan bahwa kelompok beda agama yang memiliki hubungan kultural dengan mudah dapat membangun relasi. Bahkan, dalam konflik yang bereskalasi tinggi dan mensegregasi masyarakat berdasarkan agama sekalipun, mereka tetap saling berkomunikasi baik melalui alat komunikasi seperti telepon maupun perjumpaan muka dengan muka pada wilayah-wilayah yang netral. Relasi seperti ini memengaruhi relasi antarkelompok-kelompok masyarakat secara luas di Kota Ambon untuk membangun harmoni sosial dan perdamaian secara berkelanjutan. (2)

Rumahuru (2016), meneliti tentang relasi antarkelompok masyarakat adat beda agama pascakonflik di Ohoitel Kota Tual dan Elaar Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini menemukan bahwa: (a) secara makro sistem sosial budaya masyarakat Kei diakui masih kuat, dan dapat dijadikan perekat bagi kelompok-kelompok masyarakat Kei yang beragam terutama dari segi agama dan kepercayaan, tetapi pada sisi lain ditemui pula bahwa konflik dengan latar agama beberapa waktu silam telah memengaruhi pemberlakuan sistem sosial budaya sebagai modal kultural yang menjadi kekuatan masyarakat Kei karena alasan beda agama. Memang diakui bahwa berbeda dengan wilayah lainnya di Maluku, konflik di Kei cepat teratasi dan masyarakat kembali membaur seperti biasa tetapi hingga kini masih terdapat trauma. Bahkan relasi kultural yang dianggap kuat masih perlu diuji kembali. (b) Relasi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat beda agama pascakonflik, terutama antara warga Muslim dan Kristen sepintas tampak baik, tetapi sebetulnya masing-masing orang berada dalam situasi trauma dan dendam, dan belum ada jaminan bahwa tidak akan terjadi konflik baru. Hal ini dapat dipahami dengan melihat hubungan yang renggang dan belum ada sikap saling percaya seperti sebelum terjadi konflik. Hal ini semakin kuat terasa dengan pola pemukiman yang semakin tersegregasi pascakonflik, bahkan terdapat pemahaman warga yang juga terpecah belah karena perbedaan yang dimiliki, dihadapkan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat saat ini.

Kajian-kajian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, memberi gambaran tentang bagaimana relasi antarkelompok agama dan etnik di sekolah pascakonflik, pemanfaatan modal sosial untuk memelihara damai di tengah konflik pada satu desa dengan komunitas Muslim dan Kristen yang seimbang, kerjasama antarumat beragama untuk penyelesaian konflik dengan pendekatan struktural dan fungsional, relasi dalam konflik untuk membangun perdamaian, dan relasi masyarakat adat, serta agama pascakonflik. Penelitian-penelitian tersebut juga mengambil latar tempat pada masyarakat dengan teritori permanen yang dapat dijumpai kapanpun, sementara latar tempat dalam kajian ini tidak dibatasi pada kelompok masyarakat seperti yang disebut tetapi lebih mencair dan komunitas yang memiliki mobilisasi melintasi batas-batas geografis maupun kultur dan etnik. Kelompok-kelompok tersebut memiliki aktivitas dengan pelibatan berbagi etnik dan agama, baik di Kota Ambon maupun Kota Tual. Hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain, yaitu penelitian ini secara spesifik membahas bentuk kegiatan komunitas atau kelompok masyarakat pascakonflik, yang tidak terlembaga dan tampak biasa. Aktivitas mereka potensial dan kontributif untuk membangun kerukunan atau harmoni sosial antarkelompok dalam masyarakat lebih luas di Kota Ambon dan Tual, Provinsi Maluku.

Dalam pemanfaatan modal sosial, kajian ini memiliki kesamaan dengan beberapa kajian sebelum yang telah menunjuk seperti apa teori modal sosial yang dimanfaatkan

pada satu masyarakat. Kajian ini secara tidak kaku mengikuti penggunaan teori tertentu, karena ingin memotret pendekatan dari masyarakat yang bisa saja sama, dan atau berbeda dengan kecenderungan teori yang dikemukakan. Studi ini memberi perhatian khusus pada beberapa aktivitas berbasis komunitas yang menyumbang untuk membangun modal sosial secara internal dan eksternal. Hal mana tampak pada aktivitas-aktivitas sederhana dan biasa tetapi berdampak positif membangun harmoni sosial pada masyarakat secara luas dan menyumbang pula untuk pembangunan perdamaian secara berkelanjutan. Fokus kajian ini adalah cara komunitas atau kelompok dalam masyarakat pascakonflik membangun modal sosial dan menyumbang untuk penciptaan harmoni sosial dan pembangunan perdamaian secara berkelanjutan sehingga dapat dipastikan bahwa inisiatif damai kelompok-kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan dalam proses membangun kerukunan dan bina damai.

Konstruksi Sosial dan Modal Sosial: *A Theoretical Framework*

Walau kajian ini seperti disebut sebelumnya, tidak terikat pada penggunaan teori tertentu tetapi untuk membantu menganalisis apa yang dilakukan oleh masyarakat, maka penulis tetap menggunakan konsep konstruksi sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann, serta pemikiran Robert Putnam dan Francis Fukuyama tentang modal sosial sebagai *tools* memahami lebih

konkrit seperti apa aktivitas yang telah dilakukan dapat dikatagorikan. Dengan demikian, penggunaan teori dalam kajian ini pada satu sisi adalah sebagai kerangka acuan yang memberi arah untuk pembahasan-pembahasan, dan pada sisi yang lain sebagai perbandingan terhadap apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Pilihan seperti ini didasari kesadaran bahwa sesungguhnya kelompok-kelompok masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri dan praktik-praktik pengelolaan relasi untuk membangun kehidupan harmoni dalam perbedaan yang patut diperhatikan, sehingga memungkinkan adanya kritik terhadap segala bentuk konsep yang dikemukkan para ahli sebelum, dan ditemuinya konsep yang lain.

Konstruksi Sosial

Berger dan Luckmann (1990) memandang bahwa masyarakat bukan realitas tunggal yang statis dan final. Ia merupakan realitas yang bersifat dinamis dan dialektis. Realitas bersifat plural ditandai dengan adanya relativitas seseorang ketika melihat kenyataan dan pengetahuan. Masyarakat adalah produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia juga merupakan produk masyarakat. Seseorang atau individu menjadi pribadi yang beridentitas apabila tetap tinggal dan menjadi entitas dari masyarakatnya. Di sini, Berger dan Luckmann menyimpulkan bahwa *human reality as socially constructed reality*. Realitas merupakan konstruksi sosial, merupakan sesuatu yang dibentuk.

Manusia tidak bisa eksis terpisah dari masyarakat. Masyarakat merupakan suatu fenomena dialektik, dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia dibentuk melalui beberapa proses. Pembentukan tersebut menurut Berger (1994) melalui tiga proses. Ketiga proses tersebut adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pertama, eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia nyata, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Manusia menurut pengetahuan empiris tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus-menerus ke dalam dunia yang ditempatinya. Eksternalisasi merupakan proses dialektis di mana terdapat proses penyesuaian diri dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Proses eksternalisasi ini ditandai oleh pertemuan ide-ide dari berbagai aktor yang terlibat, baik dari masyarakat maupun negara, dan berbagai lembaga.

Kedua, objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas manusia (baik yang fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsernya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan yang eksternal terhadap para produser itu sendiri. Pada proses ini, terjadi interaksi dalam dunia inter-subjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Kedua tahapan ini merupakan pembentukan masyarakat di mana seseorang atau komunitas berusaha memperoleh dan membangun tempat dalam masyarakat. Mereka melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pengakuan. Pada kedua proses ini, orang

memandang masyarakat sebagai realitas objektif. Produk dari konstruksi sosial realitas merupakan realitas objektif yang memiliki daya paksa yang memengaruhi tindakan-tindakan selanjutnya, karena adanya kesepakatan bersama.

Ketiga, internalisasi merupakan pelesapan kembali realitas oleh manusia. Individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial tempat di mana ia menjadi anggota. Selanjutnya, manusia mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Proses ini merupakan kelanjutan dari kedua tahap sebelumnya di mana pranata yang telah tercipta dilanjutkan dan dipertahankan. Untuk menjamin keberlanjutannya, harus ada pembenaran yang dilakukan oleh manusia melalui proses legitimasi yang disebut dengan objektivasi sekunder. Di sini terlihat jelas bahwa melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, masyarakat menjadi suatu realitas unik. Melalui internalisasi, manusia merupakan produk masyarakat (Berger, 1994: 4-5). Dari ketiga proses tersebut, konstruksi kenyataan sosial merupakan hasil dari sintesis ketiganya yang berawal dari ciptaan dan interaksi manusia. Struktur objektif bukan merupakan produk akhir dari interaksi sosial karena struktur berada dalam suatu proses objektivasi menuju bentuk baru internalisasi yang akan melahirkan suatu proses eksternalisasi baru kemudian objektivasi baru dan seterusnya.

Modal Sosial

Konsep tentang modal sosial sebagai alat analisis di kalangan ilmuan sosial diajukan oleh James Coleman (1988), dan dipopulerkan oleh Putnam (1993); Fukuyama (1995) dan masih banyak ilmuan di bidang sosiologi, ekonomi dan politik. Pemikiran Putnam dan Fukuyama oleh penulis dilihat secara bersama dalam hal membicarakan modal sosial karena selain terdapat kesamaan pada unsur-unsur modal sosial yang dikemukakan mereka, dalam batasan tertentu pemikiran mereka telah dipraktikkan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam membangun kerukunan dan bina damai di Kota Ambon dan Kota Tual yang sedang distudikan ini.

Putnam (1993) mengkaji tentang kehidupan politik di Italia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat sipil (*civil society* atau *civil community*). Modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama organisasi sosial seperti kepercayaan, norma-norma, jaringan-jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam satu masyarakat melalui fasilitas tindakan yang terkoordinasi. Putnam berpendapat bahwa kerjasama mudah terjadi dalam satu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik (*reciprocity*) dan jaringan antarwarga (Putnam 1993:67). Putnam lebih jauh membuat tipologi modal sosial menjadi dua, yaitu: (1) *bounding social capital* dan (2) *bridging social capital*. Bentuk yang pertama memberi perhatian ke dalam (*inward looking*),

dan bentuk yang kedua melihat keluar, yaitu kepentingan masyarakat secara luas (*outward looking*).

Fukuyama (1995), yang mengkaji bidang ekonomi menyatakan inti *social capital* adalah kepercayaan. Kepercayaan menurutnya merupakan dimensi dari kehidupan yang sangat menentukan dalam menuju keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini berbeda dengan modal material atau modal ekonomi karena modal sosial justru semakin dikelola, semakin bertambah dan dipergunakan dengan baik. Menurut pandangan Fukuyama, kepercayaan muncul jika masyarakat membagi nilai (*shared values*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Berdasarkan kepercayaan, orang tidak akan mudah curiga yang sering menjadi penghambat dari strategi pembangunan. Selain itu, kepercayaan dan jaringan memiliki dampak yang sangat positif dalam usaha peningkatan ekonomi dan pembangunan lokal.

Mengacu pada pemikiran Putnam dan Fukuyama sebagaimana dikemukakan, dapat dilihat bahwa elemen pokok dari modal sosial adalah sebagai berikut: (1) Sikap saling percaya (*trust*), mencakup kejujuran, keadilan, sikap egaliter, toleran, keramahan dan saling menghormati. (2) Jaringan sosial (*social networking*), mencakup partisipasi, resiprositas (pertukaran timbal-balik, solidaritas dan kerjasama. (3) Pranata (*institutions*), terdiri dari nilai-nilai bersama (*shared value*), norma, sanksi dan aturan-aturan.

Modal sosial dalam kajian ini dapat pahami sebagai cara

komunitas atau kelompok-kelompok dalam masyarakat membangun diri dan berelasi baik dalam kondisi konflik maupun pascakonflik di Kota Ambon dan Tual, dengan memperhatikan ketiga unsur pokok yaitu: (1) sikap saling percaya, (2) jaringan dan (3) nilai-nilai bersama. Unsur-unsur modal sosial seperti ini secara nyata tampak pada aktivitas komunitas-komunitas pertemanan, hobi, dan profesi yang secara sadar melakukan kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis, tetapi konsisten dilakukan sesuai cara mereka masing-masing.

Kerangka Pikir

Mengacu pada permasalahan yang dikaji, yaitu kerukunan atau harmoni sosial yang dikonstruksi oleh kelompok-kelompok masyarakat di Kota Ambon dan Kota Tual pascakonflik, penelitian dan atau penulisan ini memberi perhatian pada bentuk-bentuk aktivitas kelompok-kelompok masyarakat untuk menunjuk pada konstruksi kerukunan pascakonflik, dan faktor-faktor yang potensial memengaruhi terjadinya harmoni sosial pascakonflik. Pembahasan kajian ini menggunakan konsep konstruksi sosial dan modal sosial. Bagaimana kedua teori atau konsep tersebut digunakan dan berfungsi dalam kajian ini dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini.

Bagan 1. Peta Kerangka Pikir

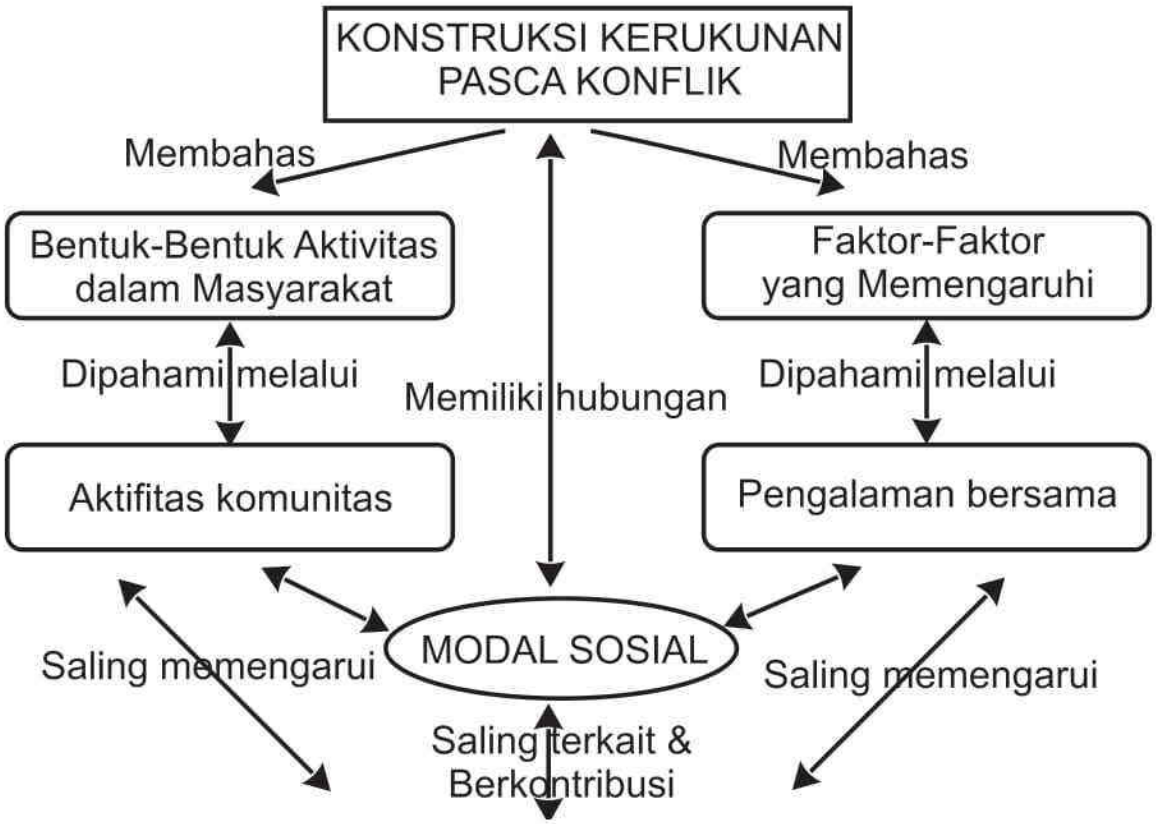

Konsep-konsep pada peta kerangka pikir menunjukkan bahwa untuk memahami konstruksi kerukunan pasca-konflik dalam studi ini, maka patut dilihat (1) Bentuk-bentuk aktivitas dalam mayarakat yang ditampilkan oleh komunitas-komunitas sesuai katagori masing-masing. (2) Faktor-faktor yang memengarui. Dalam hal ini aktivitas-aktivitas kelompok-kelompok masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sangat ditentukan oleh pengalaman bersama. Aktivitas-aktivitas komunitas dan pengalaman bersama membentuk modal sosial, yang berkontribusi bagi penciptaan harmoni sosial. Kiranya jelas juga bahwa teori konstruksi sosial Berger dan Lukmann yang memberi

perhatian pada proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi diperlukan untuk memotret dialektika dan upaya kelompok-kelompok masyarakat membangun diri dari realitas objektif mereka. Sementara itu, modal sosial yang memberi penekanan pada sikap saling percaya, norma atau nilai-nilai dan jaringan yang terbangun dalam masyarakat sangat penting dalam hal membangun harmoni sosial. Bagan peta kerangka pikir ini juga secara tegas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara kerukunan pascakonflik dengan modal sosial yang terdapat pada masyarakat setempat.

BAGIAN V
REFLEKSI TENTANG PRAKSIS MEMBANGUN KERUKUNAN DI AMBON DAN TUAL

Mendengar Suara Batin Lokal

Mengapa konflik di Kota Ambon dan Tual dengan pembunuhan, pembantaian, serta penghancuran fasilitas umum dan pemukiman penduduk secara masif ini dapat dihentikan dan pemulihannya lebih cepat dari yang diproyeksikan? Pertanyaan ini diajukan mengawali refleksi yang dijadikan penutup kajian ini dimaksudkan untuk menyelah sekaligus mengajak setiap orang berpikir kembali tentang realitas konflik dengan berbagai proses penghentian dan pemulihannya yang hampir tidak dapat dipercaya bahwa dapat teratasi dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade. Padahal terdapat spekulasi dan proyeksi bahwa konflik Maluku baru dapat terselesaikan dalam satu generasi atau minimal 50 tahun.

Mengacu pada pengalaman bekerja bersama kelompok masyarakat dan penelitian di Kota Ambon dan Kota Tual, dapat disimpulkan bahwa modal sosial dan kultural kelompok-kelompok masyarakat setempat memiliki peran sangat signifikan dan difungsikan secara maksimal untuk

penghentian konflik, pemulihan konflik dan aktivitas bina damai secara luas. Hal ini dimungkinkan karena kelembagaan adat yang membentuk jejaring di kalangan warga setempat untuk membangun relasi dan sikap saling percaya masih terjaga oleh generasi tua, dan dipatuhi pula oleh sebagian besar generasi muda. Realitas ini tidak boleh diabaikan apalagi direduksi dengan perspektif teori konflik dan perdamian yang dibangun dari luar dengan pengalaman berbeda. Di sini penulis memandang penting memperhatikan budaya lokal.

Beberapa sikap apatis dan semacam alergi terhadap budaya lokal dalam penyelesaian konflik oleh sebagian pengkaji konflik dan perdamaian sudah sepatutnya ditinggalkan dan dapat menyelami suara batin lokalitas setiap kelompok yang dikaji, agar dapat melihat secara nyata bekerja dan berfungsinya mekanisme lokal setempat. Mekanisme masyarakat lokal dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi patut mendapat perhatian bersama. Mengacu pada pengalaman di Kota Ambon dan Kota Tual dapat disebut bahwa budaya lokal, baik yang diwarisi oleh generasi sebelum maupun yang diciptakan kemudian dalam setiap proses bersama merupakan sesuatu yang oleh kelompok-kelompok masyarakat dihargai dan memiliki daya memengaruhi tersendiri. Oleh karena budaya lokal menjadi bagian tidak terpisahkan dari dirinya, maka sulit bagi mereka menyangkali eksistensi budaya lokal. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kelompok-kelompok masyarakat di Ambon dan Tual untuk

menghentikan konflik dan membangun diri keluar dari keterpurukan akibat konflik yang dihadapi satu dekade lalu.

Terbentuknya Modal Sosial Baru dalam Relasi Antarwarga Pascaconflik

Seperti dikemukakan sebelumnya, modal sosial dalam kajian ini dipahami sebagai cara komunitas atau kelompok-kelompok dalam masyarakat membangun diri dan berelasi baik dalam kondisi konflik maupun pascakonflik di Kota Ambon dan Tual, dengan memperhatikan ketiga unsur pokok, yaitu sikap saling percaya, jaringan, dan nilai-nilai bersama. Unsur-unsur modal sosial seperti ini secara nyata tampak pada aktivitas komunitas-komunitas pertemanan, hobi, dan profesi yang secara sadar melakukan kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis, tetapi konsisten dilakukan sesuai cara mereka masing-masing.

Menurut hemat penulis, aktivitas kelompok-kelompok masyarakat yang disebut pada bagian-bagian sebelumnya telah membentuk modal sosial baru di kalangan masyarakat Kota Ambon dan Kota Tual. Kelompok *papalele* dan atau pedagang kecil di pasar misalnya, mereka membangun mekanisme sendiri dengan membangun sikap saling percaya, membuat kesepakatan sendiri tentang harga dan pola distribusi di luar aturan-aturan formal, saling menjaga relasi baik antara sesama penjual, penjual dan distributor maupun penjual dengan konsumen atau pembeli. Sektor

ekonomi informal seperti disebut dengan berbagai aturan yang tidak formalnya justeru menjadi konteks perjumpaan kongkrit baik pada masa konflik sedang bereskalasi tinggi maupun pascakonflik yang disadari atau tidak telah membuka sekat-sekat perbedaan etnik dan agama yang dijadikan pemicu konflik. Penulis menemui bahwa para pelaku sektor informal ini saling menghormati dan menjaga satu dengan lainnya dengan cara mereka sendiri yang tidak diketahui umum. Patut diakui bahwa inisiatif para pedagang kecil atau tradisional disadari atau tidak telah membentuk modal sosial baru dengan membangun sikap saling percaya di antara mereka, membentuk nilai bersama dan membangun jaringan yang saat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak.

Sama seperti kelompok ekonomi nonformal, kelompok kreatif melalui hobi seperti fotografi dan kelompok seni di kalangan anak-anak muda kedua kota, mereka juga membentuk satu modal sosial baru. Masing-masing individu yang awalnya melakukan aktivitas sendiri-sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain, kini berubah drastis dengan membangun sikap saling percaya, membangun kesepakatan-kesepakatan secara tidak tertulis yang dijadikan norma dan atau nilai bersama, dan secara sadar atau tidak sadar, terbangun jejaring yang hingga kini telah terjaga baik.

Dalam perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann, proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi terjadi dalam setiap komunitas yang menjadi sasaran penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, ekternalisasi. Rata-rata komunitas

yang hingga saat ini tetap bertahan dan konsisten terhadap visinya membangun dan membina damai, telah melalui suatu pergulatan batin serius untuk selesai dengan diri mereka lebih dahulu. Banyak di antara anggota komunitas yang dianggap tidak lolos dalam pergulatan batin berdamai dengan dirinya, terutama bersedia mengingat dan melupakan serta membangun diri bersama yang lebih baik di Kota Ambon atau Kota Tual dan Maluku secara umum.

Kedua, objektivikasi. Produksi karya sastra maupun seni yang diterima oleh orang lain lintas komunitas selain merupakan kepuasan tersendiri bagi komunitas ini, yang paling penting dalam kerja inisiatif bina damai adalah penerimaan diri mereka oleh komunitas-komunitas beda agama dan etnik. Selepas dari panggung misalnya, anak-anak komunitas sastra dan seni menjadi pribadi yang sama seperti kebanyakan orang, ingin mendapat penerimaan lebih luas, tidak terbatas pada apresiasi atas karya mereka. Apa yang diingini tersebut menjadi nyata ketika mereka akhirnya diterima oleh berbagai kelompok dan dapat berkunjung atau melatih, satu hal yang sebelumnya belum pernah terjadi baik pada masa sebelum maupun sesudah konflik.

Ketiga, proses internalisasi. Pada proses ini, komunitas-komunitas seperti disebut mengalami sebuah proses refleksi diri untuk menguatkan visi dan melakukan aktivitas bina damai dalam berbagai skala dan level. Modal penerimaan menguatkan eksistensi mereka untuk terus memperluas jejaring, melibatkan semakin banyak komunitas,

mengeksplorasi potensi diri dan memproduksi karya-karya baru, melakukan pentas dan berjalan secara terus-menerus dengan keteguhan atau keyakinan atas apa yang dikerjakan memberi manfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Barron P., Azca M.N., Susdinarjanti T. (2012). *Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca-Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: CSPS Books.

Berger, Peter L. (1994). *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Berger, Peter L dan Thomas Lucmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Betrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. USA: Cambridge University Press.

Creswel J. (2010) *Research Design: Penedekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geurtjens, P.H., 2016, *Keiesche Legenden: Cerita-Cerita Mayarakat Kei Tempo Dulu*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai.

Laksono P.M., dan R. Topatimasang (ed.). (2004) *Ken Sa Faak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*. Yogyakarta: Insis Press.

Latuconsina, A., (2013). *Relasi Agama dan Etnik Dalam*

Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'oed, M. (ed.) (2000). *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.

Mujib, I. dan Rumahuru, Y.Z. (2010). *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog: Membangun Fondasi Dialog Agama-agama Berbasis Teologi Humanis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mujiburrahman. (2006). *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. ISIM Leiden: Amsterdam University Press.

Nasikum. (1989). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.

Norman, K. D., dan Yvonna, S. L. (1994). *Handbook of Qualitative*. Sage Publication, International Educational and Professional Publisher, New Delhi.

Pariela, T.D. (2008). "Damai di Tengah Konflik Maluku". Disertasi. Salatiga: Program Pascasarjana Styudi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana.

Pieris, J. (2004). *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rahawarian, H.Y. (2011). "Kerjasama Antar Umat Beragama Dalam Penyelesaian Konflik di Kota Ambon dan Kota Tual Maluku", (disertasi) pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta (tidak dipublikasi).

Rumahuru, Y.Z. (2005). "Peace and Dialogue: Kajian Sosiologi

Tentang Dialog dan Inisiatif Damai di Ambon" (tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

----------, (2016). "Relasi antar Kelompok Masyarakat Adat Beda Agama Pasca Konflik di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara: Studi Kasus di Ohoitel dan Elaar" (Laporan Penelitian). Ambon: STAKPN Ambon, Tidak Dipublikasi.

----------, (2017). "Mengonstruksi Kerukunan Dalam Masyarakat Pasca Konflik: Analisis Aktivitas Kelompok-Kelompok Masyarakat di Kota Ambon dan Kota Tual yang Menyumbang terhadap Harmoni Sosial dan Pengelolaan Keragaman" (Laporan Penelitian). Ambon: STAKPN Ambon, Tidak Dipublikasi.

Rumahuru, Y.Z. dan Ririhena. L., (2006). "Fenomena Kebangkitan Identitas Kultural Lokal dan Wacana Multikultural di Kota Ambon" (laporan penelitian), STAKPN Ambon, tidak diterbitkan.

Slamet S. (2010).*Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, S. (1989). *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soumokil, T. (2011). *Integrasi Sosial Pasca Konflik di Maluku*. Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW.

Trijono, L. (2001). *Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi*

Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ubra, Th. L. (2016). "PAK Perdamaian Berbasis Multikultur" (disertasi) STAKPN Ambon.

Van Klinken, G. (2005). "Pelaku Baru Identitas Baru: Kekerasan Antar Suku pada Masa Pasca-Soeharto di Indonesia", dalam Dewi Fprtuna Anwar (ed.), *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Fasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-LIPI-LASEMA-CNRS.

----------(2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.

INDEKS

A

Abrahamic Religions 4
A.G. Siwabesy, Dr 30
Agusthina Ch Kakiay, M.Si, Dr. xvii
Ajawaila, Pierre dkk 83
Amazing Maluku 82
Ambon (Kota) v, vi, viii, xi, xii, xiv, xvi, xvii, xviii, xix, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 101, 102
Ambon Bergerak 80, 82
Ambon Orkestra 56
Amerika (Serikat) ix, x, xv, xviii, 29, 35
Arab 29
Aru 29
Asia 29, 94
Australia 29
Azra, Azumardi 4

B

Babar 29
Bacan 29
Bali 29
Banda 29, 34
Basis Survival Strategy 12
Batu Merah 15, 32, 40, 52
Bengkel Sastra Batukarang 55, 81
Bengkel Sastra Maluku 81
Berger, Peter L. Xii
Boston University ix, xi, xii, xviii
Budha ix
Buru 29
by design 63, 64

C

Cina 29, 35
collaboration across the state-society divide xv
Coleman, James xii, 22
conflict and peace studies xi

D

Derwotubun, Jufri xviii
Desa Batu Gantong 32
Desa Batu Merah 32
Desa Wayame 12, 13, 14
Donald Trump, Presiden xv
Dwi Bei, Soile xviii

E
Elaar 16, 93
Eropa 29
Evans, Peter xv

F
Festival Musik Hawaiian 82
FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) 77
Francis Fukuyama xii, 18

G
Galtung, Johan 66
gandong xiv, 15, 40, 41, 79
GPP (Gerakan Perempuan Peduli) 77, 78
"Great nation" x

H
Hafner, Robert Profesor xviii
Halmahera 29
Heka Leka 73, 78
Hero From Lease 82
Hindu ix
Hitu 56
human reality as socially constructed reality 19

I
IAIN Ambon 55
Ibrahim, Nabi 4
identitas *evav* (kultur orang Kei) 50
Indonesia ii, ix, x, xiii, xv, xvi, xviii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 29, 30, 35, 42, 91, 92, 93, 94, 101
Inggris 35
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) xvii, 101

J
Jawa 7, 29
Jawa Timur 7
Jepang 29
"Jilbab Merah" 72, 82
Johanes Latuharhary, Dr. 30
Johanes Leimena, Dr. 30

K
Kabupaten Maluku Tenggara 16, 34, 36, 93
Kalimantan x, 7, 29
Kalimantan Tengah x
Kampung Ohoitel Lama 37
Kanada 35
Katolik ix, 37, 81
Kecamatan Kur Selatan 35
Kecamatan Leitimur Selatan 31
Kecamatan Nusaniwe 31
Kecamatan P. Dullah Selatan 35
Kecamatan P. Dullah Utara 35
Kecamatan P.P. Kur 35
Kecamatan Sirimau 31
Kecamatan Tayando Tam 35
Kecamatan Teluk Ambon 31
Kecamatan Teluk Ambon Baguala 31
Kei (Kepulauan) 16, 29, 34, 35, 37, 38, 50, 91
Kei Besar 34
Kei Kecil 34
Kelompok Tari Heka-Leka 73
Kintal Sapanggal Karangpanjang 56

Kisar 29
Komunitas Hikayat Tanah Hitu 56
Komunitas seni (literasi sastra, hip-hop) 77
Konghucu ix
Kopi Badati (Parakletos) 77
Korea 29
Kristen ix, x, xvii, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 49, 60, 67, 72, 75, 81, 82, 92, 101
Kupang 7

L

Laha 56
Laimeheriwa, Marlin xviii
Lakor 29
Langgur 34
Lapangan Merdeka 75
Larvul Ngabal 15, 36, 38
Latuconsina, Adam 10
Laut Arafura 34
Laut Banda 34
Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM) 68, 77
Leti 29
Liang 63
Lombok 29
Luang 29

M

Maluku v, vii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 92, 93, 94, 101
Maluku Bamboowind Orchestra (MBO) 56, 75
Maluku Barat Daya 29
Maluku Tengah 52, 63, 101
Maluku Tenggara Barat 29
Mama HS 53
Mamala 56
Manut An Mahe Ni Tilur 38
M.J. Papilaya (Walikota) 56
masa kolonial 28, 29
metode playing kambing hitam 64
Moa 29
Moluccan Ambasador For Peace 77
Morella 56
Morotai 29
Muslim ix, x, 11, 16, 17, 32, 33, 72, 81, 82, 92, 101
Myanmar 35

N

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3
Negeri Batu Merah 15, 40
Negeri Passo 15, 40
non-Muslim ix
Nusalaut 29

O

Ohoitel 16, 36, 37, 93
open society 13
orang basudara 6, 82

P

Pancasila ix
papalele 47, 48, 52, 87
Papua 29
Parakletos 46, 77, 78, 82
Pariela 2, 12, 13, 92
Pasar Kaget 72
Pasar Mardika 48, 49, 52
Pattimura Park 75, 82, 84
pela xiv, 15, 40, 41, 79
pemuda-pemudi Naku 76
Poso x
Preserved Social Capital 12
Provinsi Maluku 6, 8, 9, 17, 27, 28, 34, 42, 75
Pulau Haruku 29, 101
Putnam, Robert xii, 18

R

Romang 29
Rumah Kita Hila 56
Rumah Pintar Tulehu 56
Rumahuru, Yance Z. Dr. xi, 1, 2, 6, 7, 15, 16, 28, 29, 41, 92, 93, 101

S

salam-Sarane 14
Sanggar Bokor Mas 56
Sanggar Cakadidi 55
Sanggar Ilalang 55
Sanggar Seni Amalatu 56
Sanggar Seni Kopi 56
Sanggar Teater Kapahaha 56
Saparua 29
Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon xvii, 101
Selaru 29
Selat Nerong 34
Sera 29
Seram 29, 101
Sermatang 29
sibling rivalry 4
Siwalima 67, 77, 80
Soeharto, Presiden x
Soya Kecil 67
Sula 29
Sulawesi 29
Suli 63
Sumatra 29
Sumbawa 29

T

Taiwan 35
Taman Jembatan Watdek 75
Tanimbar 29
Teater Embun 56
Teater Kabaresi 56
Teater Lawamena 56
Teater Maluku 56
Teater Merah Saga 56
Teatron 82
Ternate 29
Thailand 35
Tifa Damai (Budaya) 77
Timor 29
TIRUS (Tim Relawan Kemanusiaan) 77, 78
TNI x, xi, xiii

TrotoART 82
Tual (Kota) xii, xvi, xvii, xviii, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 75, 76, 85, 86, 87, 89, 92, 93
Tulehu 52, 53, 56, 63

U

Ubra 2, 7, 13, 94
UKIM 55, 73, 81, 101
Universitas Gadjah Mada xi, 93, 101
Universitas Pattimura 55, 82

V

Vietnam 35
Vuut An Mahe Ni Ngifun 38

W

Waai 52, 53, 63
Wakal 56
Wenno, Vincent xviii
Wermasubun, Regina xviii
Wetar 29

Y

Yamdena 29
YAP (Youth Ambassador For Peace) 78
Yogyakarta iv
Yutnes Eldios, Tuale xviii

Tentang Penulis

Dr. Yance Zadrak Rumahuru, lahir di Horale (Seram Utara) 07 Juni 1973, memulai karier sejak 2001 di bidang akademik sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon, yang sejak 2018 telah bertransfromasi menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon. Selain mengajar di IAKN, sejak 2016 menjadi pengajar tidak tetap pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Ia menamatkan program sarjana dari Jurusan Filsafat Agama Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon dengan skripsi tentang "Kepercayaan atau Agama Orang Huaulu di Seram Utara". Menamatkan program magister tahun 2005 dari Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tesis tentang "Dialog dan perdamaian di Ambon 1999-2002". Menamatkan studi doktor tahun 2012 dalam bidang kajian agama dan antar budaya di Sekolah Pascasarjana UGM, dengan disertasi "konstruksi identitas keagamaan dan perubahan sosial di kalangan komunitas Muslim Hatuhaha di Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah." Memiliki pengalaman penelitian dan publikasi serta presentasi karya ilmiah pada

berbagai forum nasional dan internasional. Saat ini diberi tugas tambahan di IAKN Ambon sebagai wakil rektor satu bidang akademik dan kelembagaan. Walaupun sibuk dengan tugas administratif, beliau tetap memiliki komitmen untuk terus melakukan penelitian dan publikasi secara rutin setiap tahun.

Buku tipis tapi penting ini menunjukkan bagaimana modal sosial yang ada di Kota Ambon dan Kota Tual berhasil membangun kembali kerukunan masyarakat pascakonflik di dua kota itu. Saya terkesan dengan kejelian penulisnya dalam menangkap berbagai ekspresi dan dampak modal sosial itu – bukan saja dari para pemimpin agama atau adat, tetapi juga dari orang-orang biasa seperti ibu-ibu di pasar atau anak-anak muda yang punya hobi fotografi. Buku ini penting dibaca bukan saja oleh para pembuat kebijakan agar dapat memanfaatkan berbagai modal sosial untuk mencegah konflik sosial di masa depan, tetapi juga oleh para akademisi agar bisa menghasilkan penelitian-penelitian sosial yang kreatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari *(Ihsan Ali Fausi, Direktur PUSAD Paramadina)*.

Bayangkan terkepung tsunami provokasi beraroma anti SARA. Berjalan, berlari, terbang, terserah! Tertawa, menangis, marah, terserah. Begitulah jika berada di jantung Ambon atau Tual tahun 1999 sebagai pelaku, saksi, atau korban. Siapa saja bisa frustrasi karena merasa diri paling sial di Bumi. Akan tetapi, tahun-tahun berikut ketika asap masih membumbung, telah muncul satu lapisan baru generasi milenial yang merajut perjumpaan kreatif penuh makna. Langgam mereka sungguh mengharukan sebab mereka membangun perdamaian sejati dari jiwa yang semula porak-poranda menjadi bangunan Maluku, bagai baru diciptakan kembali. Siapa saja merasa paling berbahagia sebagai saksi rekonstruksi batin kebudayaan Maluku. Buku ini mengungkap denyut nadi orang Maluku sebagai petarung paling berani yang suka damai. Maka dengan mata batin bening, kita bisa saksikan sidik jari Tuhan.
(Rudi Fofid, penyair di Ambon).

Menceritakan ulang konflik Maluku dengan berbagai cerita-cerita pilu yang menyertainya bukan merupakan satu hal yang mudah, karena konflik tersebut begitu membekas. Namun dinamika kemasyarakatan yang terjadi selama dua dekade terakhir di Maluku, menunjukkan bahwa orang Maluku, baik orang tua maupun anak-anak muda tidak mau membiarkan konflik tersebut menghantui kehidupan dan masa depan mereka. Kisah-kisah inspiratif yang diangkat dalam buku ini menunjukkan energi positif orang Maluku dalam merajut persaudaraan yang sempat terkoyak dengan menghidupkan kearifan lokal *orang basudara* sebagaimana terungkap dalam diksi lokal *hidop baku bae, suka biking bae, laen sayang laen* dan seterusnya. Oleh sebab itu sebagai pemimpin agama di Maluku, kami sangat mengapresiasi kegigihan Dr. Yance Z. Rumahuru untuk merekam kisah-kisah dimaksud sebagai bagian dari penguatan struktur perdamaian di Maluku dari waktu ke waktu. *(Abdulah Latuapo, Ketua MUI Maluku)*.

ISBN 123456789-X
9 781234 567897

PENERBIT OMBAK
Perumahan Nogotirto III,
Jl. Progo B-15 Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945 / 082221483637;
Fax. (0274) 620606
Email: redaksiombak@yahoo.co.id
www.penerbitombak.com Penerbit OmbakTiga

Dua Kota Satu Cerita

YANCE Z. RUMAHURU